

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

\_\_\_\_\_

1

|         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Tanggal | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Bulan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | 2023 |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ✓   |     |     |      |

# Ada Honorarium Tak Semestinya

DPRD Bandarlampung Harus Mengembalikan ke Kas Daerah

**BANDARLAMPUNG** - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di DPRD Bandarlampung ternyata bukan hanya terkait tunggakan pajak penghasilan 50 anggotanya. Melainkan terdapat juga honorarium di DPRD setempat yang tidak semestinya, yaitu sebesar Rp130.050.000.

Diketahui, Sekretariat DPRD Bandarlampung sendiri menganggarkan belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp1.690.875.000 dengan realisasi Rp1.423.950.000 atau 84,21%. Belanja honorarium narasumber tersebut di antaranya merupakan realisasi kegiatan uji publik rancangan peraturan daerah (raperda) dan konsultasi publik program pembentukan peraturan daerah (propemperda).

Baca | ADA | Hal. 4

Ada..

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pada dua kegiatan tersebut, anggota DPRD diberikan honorarium narasumber masing-masing kegiatan sebesar Rp425.000 per orang per jam setelah dipotong pajak dengan jumlah jam masing-masing selama tiga jam pembahasan. Di mana pada dua kegiatan itu juga melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.

Terkait hal ini, BPK berpendapat tidak seharusnya diberikan honorarium karena merupakan fungsi DPRD. Di mana dalam melaksanakan fungsi tersebut kepada DPRD telah diberikan hak keuangan. Selain itu, PPTK juga menerangkan anggota DPRD seharusnya menjadi narasumber penyanggah, bukan menjadi narasumber pematari.

Meski temuan BPK ini jumlahnya tidak besar seperti tunggakan pajak penghasilan 50 anggota termasuk Ketua DPRD Bandarlampung, pihak BPK tetap memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Bandarlampung. Di antaranya untuk memerintahkan Sekretaris DPRD menginstruksikan PPTK, PPK-SKPD, dan bendahara pengeluaran memedomani ketentuan berlaku dalam memberikan honorarium narasumber serta menyetorkannya ke kas daerah dengan nominal tertera di atas.

Sayangnya, lagi-lagi Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi dan Sekretaris Dewan Tri Paryono belum dapat dikonfirmasi. Saat akan ditemui di ruang kerja masing-masing, Kamis (5/10), keduanya tidak ada. Begitu juga saat dikonfirmasi beberapa kali melalui ponselnya, meski aktif, tidak merespons.

Menurut para staf yang berjaga di ruangannya bahwa Wiyadi dan Tri masih melakukan dinas luar dan tidak tahu kapan kepastian kembalinya. "Belum ada informasi kapan baliknya," ujar salah satu di antaranya.

Sementara, Sekretaris Kota Bandarlampung Iwan Gunawan menyebut dirinya bakal mengecek kembali apakah honorarium yang tidak semestinya itu sudah dikembalikan ke kas daerah atau belum. "Soal temuan itu akan saya cek dahulu ke keuangan ya. Termasuk yang Rp1,8 miliar itu ya," ujarnya saat ditemui di lingkungan Pemkot Bandarlampung, Kamis (5/10).

Diketahui, DPRD Bandarlampung terus menjadi sorotan. Bukan hanya karena tidak mengabdikan pengabdian tas pada program Bina Lingkungan (Biling) Pemkot Bandarlampung, tetapi ironisnya DPRD Bandarlampung (Balam) sendiri justru memiliki program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang pagu anggarannya sangat fantastis. Bahkan, ke-50 anggota DPRD setempat juga menunggak pajak penghasilan.

Terlebih terkait paket penyelenggaraan hubungan masyarakat yang pagu anggarannya mencapai Rp9,8 miliar lebih, pihak DPRD Bandarlampung hingga kini masih tertutup. Baik Ketua DPRD-nya, Wiyadi, maupun sekretarisnya, Tri Paryono, belum dapat dimintai penjelasan.

Beberapa kali hendak ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (4/10), Wiyadi tidak ada. Kemudian saat dihubungi melalui telepon, meski dalam keadaan aktif, ia tidak mengangkatnya.

Demikian halnya Tri Paryono, belum dapat dikonfirmasi. Menurut Humas DPRD Bandarlampung Dody, baik ketua maupun sekretarisnya sedang dalam perjalanan

tw.

1/2

| Tanggal | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

| Bulan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | 2023 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ✓   |     |     |      |

dinas luar (DL).

Sedangkan terkait anggaran sebagaimana dimuat *Radar Lampung* sebelumnya, Dody pun mengatakan bahwa itu bukan untuk program bimtek, melainkan program PIP atau Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Itu bukan bimtek ya, tetapi PIP. Ya memang itu adanya di humas, tetapi Pak Sekwan (Sekretaris DPRD) yang lebih berwenang menerangkannya. Namun saat ini beliau sedang DL," ujarnya, Rabu (4/10).

Sementara diketahui juga, 50 anggota DPRD Bandar Lampung termasuk ketuanya, Wiyadi, ternyata menunggak pajak penghasilan hingga Rp1,8 miliar lebih. Itu berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Di mana, BPK RI merekomendasikan Wali Kota Bandar Lampung agar memerintahkan Sekretaris DPRD Bandar Lampung menginstruksikan bendahara pengeluaran untuk berkoordinasi dengan KKP Pratama Bandar Lampung atas kurang pungut setor PPH pasal 21 sebesar Rp1,8 miliar lebih dari anggota DPRD Bandar Lampung tersebut.

Ditanya terekait tunggakan pajak dimaksud pada kesempatan sama kemarin, Humas DPRD Bandar Lampung Dody mengaku kurang paham. "Saya kurang paham. Yang paham keuangan, Bu Hesti. Tetapi, beliau juga lagi DL," singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Bandar Lampung kembali menjadi sorotan publik. Setelah disorot karena tidak mengabulkan pengadaan tas pada program Biling Pemkot Bandar Lampung, kini terkait program bimtek milik DPRD Bandar Lampung sendiri yang pagu anggarannya sangat fantastis.

Itu sebagaimana terlihat dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis *web* atau SiRUP DPRD Bandar Lampung. Dalam SiRUP itu terdapat paket pekerjaan DPRD Bandar Lampung untuk penyelenggaraan hubungan masyarakat dari APBD tahun 2023. *Item*-nya program Bimtek DPRD dengan anggaran Rp9,8 miliar lebih untuk waktu Januari hingga Desember 2023.

Dari total 50 anggota DPRD Bandar Lampung yang ada, artinya per anggota DPRD-nya mendapatkan Rp180 juta lebih hanya untuk program bimtek saja. Nilai ini tentu sangat fantastis dibandingkan urgensi program lainnya seperti pendidikan dan kesehatan yang justru kurang mendapat perhatian dari dewan setempat.

Sayangnya, Ketua DPRD Bandar Lampung sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banang) Wiyadi tidak bisa dikonfirmasi dari anggaran tersebut apa saja yang sudah terealisasi. Begitu juga dengan Sekretaris DPRD Bandar Lampung Tri Paryono yang menolak saat akan ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (3/10). "Maaf belum bisa *nemui* ya. Lagi mau menghadap pimpina. Dan, ini masih di luar," kilahnya.

Sementara anggota banang lainnya, Deddy Yuginta, yang ditemui di gedung DPRD setempat, mengaku tidak mengetahui soal anggaran tersebut. "Coba ke komisi I," sarannya.

Ketua Komisi I Sidik Effendi sendiri saat ditanya menyebut akan mengecek terlebih dahulu anggaran dimaksud. "Coba nanti saya cek dulu ya, Mbak," singkatnya.

Sebelumnya juga, pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung (Unila) Dr. M. Thoha B. Sampurna Jaya memper-

tanyakan di mana keberpihakan anggota legislatif. Ini pasca putusan DPRD Bandar Lampung yang tidak mengabulkan tambahan anggaran untuk para siswa program Bina Lingkungan (Biling) pada APBD Perubahan 2023, beberapa waktu lalu.

Thoha menyebut DPRD seharusnya membantu rakyat dengan memperluas program Biling itu supaya bisa merata bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta. Bukan malah dengan tidak mengabulkan anggaran tersebut.

"Sebenarnya saya sering katakan bahwa masalah pendidikan membutuhkan komitmen dari daerah. Mestinya Biling ini semakin diperluas sampai-anak-anak di sekolah swasta. Karena kata kuncinya memberi bantuan kepada anak miskin, bukan kepada sekolah," katanya, Minggu (1/10).

Menurutnya jika berbicara realistis atau tidak, tentu hal tersebut sudah ada hitung-hitungan ke depan bagaimana penguangan anggaran di lapangan. "Mestinya legislatif mempunyai rasa keberpihakan pada orang-orang miskin," ujarnya.

Terlebih, lanjut Thoha, anggaran yang hanya untuk orang miskin jumlahnya terbilang sedikit dari total APBD yang dimiliki saat ini. "Anggaran itu kalau mau hitung dan kita teliti berapa persen sih dari APBD itu untuk orang miskin. Mestinya melihatnya begitu, ada enggak persentasenya. Itu kalau kita berpihak kepada rakyat miskin," cetusnya.

Karena itu, dia berharap DPRD bisa mendukung program Biling tersebut, bahkan memperluasnya. "Saya pikir itu kalau dia berbicara realistis di mana letak tidak realistiknya. Itu kalau kita bicara tentang keberpihakan kita dengan dunia pendidikan. Pertanyaan kita, berapa besar sih dana pendidikan pada APBD kita? Sudah mencapai persyaratan dan sesuai dengan perundang-undangan yang 20 persen itu harus dilihat juga. Kita juga tidak mengecilkan PIP. Tetapi sifatnya spesifik kalau Biling kan jelas untuk membantu anak-anak kurang mampu, itu yang harus dipikirkan," pungkasnya.

Diketahui, DPRD Bandar Lampung menjadi sorotan publik setelah Wali Kota Eva Dwiana menyebut ada beberapa poin anggaran yang diajukan pemkot pada APBDP Bandar Lampung dicoret dewan. Di antaranya anggaran program Bina Lingkungan (Biling), Satgas Perempuan, serta pengajuan penambahan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

Sebagaimana disampaikan Kepala BPKAD Bandar Lampung M. Nur Ramdan, jumlah anggaran yang tidak disetujui DPRD Bandar Lampung tersebut senilai Rp4 miliar. Anggaran itu mencakup usulan pengadaan sepatu, baju seragam, tas seisinya, dan topi untuk para siswa SD dan SMP penerima program Biling di Bandar Lampung.

"Kalau Biling ini pengajuannya Rp4 miliar. Ini hanya tambahan karena di (APBD) induk sudah ada. Karena Dinas Pendidikan kemarin (sebelumnya di APBD murni, *Red*) itu kurang *ngitungnya*, jadi diusulkan di (APBD) perubahan," beber Ramdan saat dijumpai di ruangan kerjanya, Jumat (29/9).

Menurutnya dengan anggaran yang tidak dikabulkan dewan, pihaknya terpaksa memaksimalkan dana Biling pada APBD murni. "Cukup enggak cukup, itu yang kita pakai dan akan kita tambah lagi di 2024," ucapnya. (mel/c1/rim)

3

2/2